

ORGANISASI PRODUKSI DAN KETENAGAKERJAAN PADA INDUSTRI PERUNGGANAN DI JAWA BARAT

Peneliti : Joan Hardjono dan Maspiyati

1. Pendahuluan

Pembangunan dunia perunggan di Jawa Barat khususnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerataan kesempatan usaha dengan menjadikan usaha peternakan ayam ras petelur dan pedaging sebagai usaha keluarga di pedesaan.

Beberapa bentuk pembinaan usaha peternakan ayam ras telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan. Bentuk pertama adalah pembinaan peternak ayam ras skala keluarga yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 50 tahun 1981. Menurut Keppres ini, perorangan/badan hukum hanya diperkenankan mempunyai jumlah ayam petelur dewasa sebanyak-banyaknya 5.000 ekor atau menghasilkan produksi ayam daging sebanyak-banyaknya 750 ekor setiap minggu; yang skalanya lebih besar harus mengurangi jumlah ternak ayamnya secara berangsur-angsur melalui periode phase-out. BULOG diberi peranan sebagai stabilisator harga bahan baku maupun produk melalui pengendalian pasar (Pasal 8), sedangkan Koperasi merupakan badan resmi yang membantu menyalurkan input produksi dan memasarkan hasil dari peternak kecil (Pasal 9).

Karena ternyata hasilnya kurang memuaskan, bentuk pembinaan ini kemudian disempurnakan menjadi bentuk PIR, yaitu suatu usaha kerjasama tertutup antara peternak ayam sebagai plasma dengan usaha swasta sebagai inti. Akan tetapi keterlibatan pihak swasta yang semula diharapkan akan dapat membantu pemerintah mengatasi berbagai permasalahan (terutama harga input dan pemasaran output) juga ternyata belum memberikan hasil yang memuaskan. Bentuk paling akhir yang direkomendasikan adalah pembinaan dalam bentuk perkampungan ayam atau dalam bentuk kerjasama manajemen yang diwujudkan dengan pembentukan kelompok-kelompok peternak ayam.

2. Tujuan

Penelitian dilakukan untuk melihat bentuk organisasi produksi perunggan dan mengamati sejauh mana perkembangannya di Jawa Barat mampu menjadi suatu lapangan usaha bagi masyarakat pedesaan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengamati hubungan proses produksi dan pemasaran hasil produksi pada tingkat peternak kecil, tingkat penyerapan tenaga kerja, kondisi perkembangan perunggan dewasa ini serta intervensi pemerintah dan pengaruhnya terhadap perkembangan industri perunggan di Jawa Barat khususnya.

3. Metodologi

Penelitian telah dilaksanakan sejak bulan Januari 1989 hingga bulan Juli 1989. Lokasi penelitian ditentukan di sembilan kabupaten di Jawa Barat berdasarkan populasi terpadat ternak ayam ras menurut data laporan dari Dinas Peternakan. Selain pengamatan langsung ke lokasi, penelitian dilengkapi dengan pengamatan data sekunder yang dipublikasikan dari berbagai instansi dan lembaga penunjang. Metoda yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara langsung dengan responden. Wawancara dilaksanakan secara formal maupun informal dengan memanfaatkan hubungan kekeluargaan. Responden terdiri dari peternak ayam berbagai skala usaha, pegawai kandang, pengurus kelompok peternak serta aparat Dinas Peternakan di kabupaten yang bersangkutan. Untuk melengkapi informasi dilakukan pula wawancara dengan beberapa orang pengamat perkembangan perunggasan diantaranya anggota Dewan Redaksi Majalah Poultry Indonesia, pengurus PPUI, pengurus KUD/KPU dan beberapa peternak yang telah mengalami kegagalan baik yang masih aktif maupun yang sudah tak aktif lagi.

4. Hasil penelitian

4.1 Kondisi Peternakan Unggas di Jawa Barat

Di berbagai lokasi hasil penelitian menggambarkan bahwa usaha peternakan ayam ras umumnya tidak lagi mengikuti pola usaha yang diisyaratkan dalam Keppres No. 50/81. Sebagian besar usaha tersebut mempunyai skala produksi lebih dari 750 ekor ayam pedaging per minggu atau ayam petelur melebihi batas 5.000 ekor. Saat ini sangat sulit untuk menemukan peternak ayam ras yang berskala kecil, meskipun dalam laporan Dinas Peternakan terdaftar banyak peternakan rakyat. Hampir semua peternak kecil yang masih aktif kini hanya memiliki investasi usaha berupa kandang baik yang diperoleh melalui program kredit Keppres No. 50/81 dari pemerintah maupun modal pribadi.

Dalam pelaksanaannya, Keppres No. 50/81 dilengkapi dengan paket kredit. Paket kredit ini dimaksudkan sebagai pendamping bagi proses pelaksanaan phase-in agar peternak-peternak kecil yang baru tumbuh dalam arti sesungguhnya (bukan sebagai buruh) mendapat bantuan pinjaman awal beternak. Akan tetapi dalam sistem perunggasan keseluruhan pelaksanaan phase-out ternyata tidak dapat dilaksanakan. Hal ini berakibatkan pelaksanaan Keppres No. 50/81 mengalami kegagalan karena peternak-peternak kecil yang baru tumbuh mengalami persaingan usaha yang monopolistis.

Pada usaha skala menengah (5.000 - 100.000 ekor petelur dan 750 - 100.000 ekor pedaging), peternak memiliki modal usaha yang lebih besar. Umumnya mereka memulai usaha peternakan ayam ras dengan modal pribadi meskipun hampir semuanya pernah menikmati fasilitas kredit yang disediakan dalam program Keppres No. 50/81. Tetapi karena kemampuan mereka untuk memprediksikan situasi pasar dan keberanian mereka untuk mengambil resiko, sebagian peternak tersebut telah mampu mencicil kredit tersebut.

Berbeda keadaannya pada perusahaan peternakan yang berskala cukup besar di atas 100.000 ekor petelur maupun pedaging. Untuk mengatasi kemelut harga komoditi telur dan daging ayam serta input produksi mereka melakukan integrasi vertikal maupun horizontal. Integrasi vertikal dilakukan dengan membentuk unit pembuatan pakan (feed mill) dan/atau pembibitan (breeding farm). Input produksi yang dihasilkan selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri juga disebar ke peternak kecil. Usaha peternakan terintegrasi sangat dominan ditemukan di Tangerang, Bogor dan Cianjur. Satu kecenderungan baru yang timbul sekarang yaitu banyak tenaga ahli dari suatu pabrik obat-obatan tertentu yang melakukan usaha peternakan ayam tetapi mereka sendiri tidak terlibat langsung dalam kegiatan proses produksi. Biasanya mereka berkelompok menguasai wilayah-wilayah tertentu.

4.2 Hubungan Proses Produksi dan Pemasaran

Peternak kecil umumnya adalah pelaku-pelaku proses produksi yang mempunyai ketergantungan suplai input produksi serta pemasaran komoditi yang dihasilkan. Pada beberapa kasus dimana usaha peternakan merupakan usaha kedua, peternak hanya mampu membeli DOC tetapi pakan dan obat-obatan dibayar dengan menyerahkan ayam broiler atau telur yang berhasil dipanen. Permasalahan yang paling sering menimbulkan kegelisahan para peternak kecil adalah gejolak fluktuasi harga produk telur dan daging ayam. Dalam kondisi yang serba tak pasti demikian pemasaran merupakan kunci utama bagi kelangsungan usaha mereka.

Dengan kemampuan menguasai jaringan pasar sendiri meskipun dalam skala yang cukup kecil, peternak menengah dapat lebih bebas bergerak mengendalikan usahanya. Usaha survival ditempuh melalui penyesuaian skala produksi atas situasi harga dan demand pasar. Walaupun demikian bagi perusahaan peternakan yang telah melakukan integrasi, persaingan pasar tetap lebih terkendali. Bahkan dalam beberapa kasus, perusahaan peternakan inilah yang justru mengendalikan tingkat harga pasar kedua komoditi perunggasan.

Keterbatasan modal dan kemampuan memasarkan hasil produksi menggiring peternak kecil ke dalam sistem contract-farming dengan pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan peternakan/Kedai Unggas (Poultry Shop). Umumnya sistem kontrak ini terjadi pada usaha ternak broiler yang membutuhkan waktu relatif singkat (35-42 hari) dan investasi lebih kecil dibandingkan dengan usaha ternak ayam petelur.

Ada dua jenis sistem contract-farming yang terjadi pada peternak kecil. Pertama sistem kontrak berdasarkan bagi hasil keuntungan. Pada sistem ini, peternak memiliki investasi kandang dan pengalaman beternak. Seluruh input produksi disuplai oleh usaha swasta perorangan maupun pemilik Poultry Shop. Peternak ikut menanggung resiko kerugian tetapi biasanya tidak turut berperan dalam memasarkan produksinya. Pada sistem kontrak kedua, peternak kecil hanyalah pelaku proses produksi dengan menerima imbalan upah yang tidak besar. Pada kondisi demikian peternak terbebas

dari resiko dan kegiatan pemasaran, namun statusnya tak lebih daripada se-orang buruh upahan.

Selain kedua bentuk kontrak di atas, dijumpai pula bentuk kerja sama antara satu kelompok peternak dengan perusahaan pakan ayam dan/atau pembibitan. Sejauh ini, kerja sama berkelompok merupakan satu bentuk yang dipilih oleh beberapa peternak skala menengah untuk memperoleh beberapa keuntungan. Pertama, suplai input produksi akan lebih lancar karena jumlah pesanan cukup besar bagi perusahaan yang bersangkutan. Kedua, harga input produksi lebih rendah. Ketiga, memperoleh pelayanan lebih intensif dari teknisi lapangan. Keempat, lebih mudah memasarkan produksi karena memiliki jaringan pasar tersendiri.

4.3 Ketenagakerjaan pada Sub-sektor Peternakan Unggas

Usaha peternakan ayam ras menyediakan peluang kerja untuk buruh sebagai anak kandang yang menangani kegiatan proses produksi sehari-hari serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak kandang adalah memberi pakan dan air minum dan melakukan sanitasi serta vaksinasi dan panen produksi. Imbalan rata-rata tidak lebih dari upah buruh tani.

Usaha keluarga dengan skala produksi 1.000 ayam petelur atau 3.000 ekor ayam pedaging per periode melibatkan seorang tenaga kerja untuk seluruh kegiatan proses produksi. Tetapi pada usaha yang lebih besar dibutuhkan beberapa tenaga kerja dengan imbalan rata-rata satu orang tenaga kerja menangani 2.500-3.000 ekor ayam pedaging atau 1.000 ekor ayam petelur.

Sektor peternakan ayam ras skala besar dapat menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi hampir di tiap lokasi penelitian menunjukkan bahwa sektor ini kurang terbuka bagi masyarakat setempat. Di satu kasus peternakan di Lembang, misalnya, sebagian besar anak kandangnya berasal dari Jawa Tengah. Menurut pemilik usaha itu, para anak kandang ini sengaja didatangkan atas pertimbangan bahwa masyarakat Jawa memiliki ketekunan bekerja yang cukup tinggi. Tetapi sebetulnya alasan utamanya adalah kontinuitas kerja para anak kandang dari daerah lain lebih terjamin dari pada jika mempekerjakan tenaga kerja setempat yang biasanya tidak mau tinggal di lokasi peternakan.

Tenaga kerja wanita hampir tidak ada pada kegiatan proses produksi. Keterlibatan tenaga kerja wanita biasanya hanya pada pekerjaan penunjang seperti menggantikan tugas yang menjadi kewajiban suami ketika ia berhalangan, dan itu pun sangat jarang terjadi. Pada usaha peternakan menengah dan terintegrasi, wanita (istri atau anak wanita si pemilik usaha) menangani urusan keuangan, atau pekerjaan yang berhubungan dengan Kedai Unggas. Pada beberapa kasus peternakan ayam petelur besar dan menengah terdapat pekerja wanita tetapi keterlibatannya terbatas pada kegiatan pengumpulan dan pengepakan telur untuk dijual di supermarket.

**PERANAN PIR - TEH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN DAN PELUANG BERUSAHA
DI DAERAH PEDESAAN**

(Studi kasus di empat desa di Jawa Barat)

Tujuan penelitian :

1. Mengidentifikasi peranan lembaga pemerintah terhadap usaha perusahaan inti mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan petani teh.
2. Mengidentifikasi hubungan kerja antara petani teh dengan perusahaan inti dalam kaitannya dengan pembinaan petani dan penjualan pucuk teh.
3. Menilai pertumbuhan produksi, pendapatan petani, dan kegiatan bekerja rumahtangga petani teh.

Metode dan lokasi penelitian :

Studi ini bersifat studi kasus di dua desa binaan PIR-lokal dan dua desa binaan P.T Tehnusamba. Dari tiap desa ditentukan sejumlah petani kasus yang terdiri dari petani "luas" dan petani "kecil". Sebagai pembandingan dipelajari juga petani yang tidak menjadi peserta PIR-lokal.

Status Petani	Tehnusamba		Sinar Inesco		Bukan Peserta PIR	
	Desa Bojong (Sukabumi)	Desa Pasirsalam (Tasikmalaya)	Desa Bojonggambir (Tasikmalaya)	Desa Ciroyom (Tasikmalaya)	Desa Bojonggambir	Desa Ciroyom
Luas	10	11	6	5	2	-
Kecil	14	12	7	4	3	3

Penelitian tahap-I dilakukan di desa Bojong (Sukabumi) dan desa Pasirsalam (Tasikmalaya) pada tanggal 20 Juni - 9 Juli 1988. Penelitian tahap-II dilakukan di desa Bojonggambir dan desa Ciroyom, keduanya di Tasikmalaya) pada tanggal 21 November - 11 Desember 1988.

Temuan dan kegunaannya :

Temuan	Pemda		Di nas Perkebunan	Inti	Plasma
	Prov.	Kab.			
A. <u>Peranan lembaga pemerintah</u>					
1. Terjadi beberapa penyimpangan prinsip PIR di lapangan, misalnya yang menyangkut posisi petani dan rantai tataniaga, tetapi kurang memperoleh perhatian lembaga pengawas yang telah dibentuk di berbagai tingkat pemutus kebijaksanaan (TP3D)	X	X	X		
2. Aparat desa dan kecamatan hampir tidak memenuhinya dalam Forum Musyawarah Produksi Teh (FMPT) sehingga dapat merugikan posisi petani		X	X		
B. <u>Hubungan inti-plasma</u>					
3. Konsep pembinaan petani teh sudah jelas tetapi belum efektif sehingga kurang mendukung alih teknologi produksi		X	X	X	X
4. Penunjang keberhasilan PIR seperti kredit, prasarana jalan, penyuluh, KUD, belum berfungsi penuh	X	X	X	X	
5. Meskipun harga pupuk teh sekarang relatif stabil dan lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, nilai tukar terhadap beras masih tetap rendah		X	X	X	X
C. <u>Pertumbuhan</u>					
6. P. T. Tehnucamba belum dapat mengangkat sumbangan kebun teh terhadap pendapatan rumah-tangga, baik untuk golongan petani luas maupun petani kecil	X	X	X		
7. PIR-lokal (P.T Sinar Inesco) berhasil meningkatkan sumbangan kebun teh terhadap pendapatan rumah-tangga hanya untuk golongan petani luas	X	X	X	X	
8. Petani bukan peserta PIR memperoleh pendapatan terutama dari tanaman lain atau dari luar sektor pertanian. Kebun teh kurang mendukung pendapatan rumah-tangga		X	X		
9. Peningkatan Curahan kerja di kebun teh akibat pelaksanaan PIR ditangan ^{ganc} oleh tenaga kerja luar rumah-tangga (buruh petik angkut). Tenaga kerja dalam rumah-tangga dicurahkan ke luar sektor pertanian		X	X		
10. PIR-teh mengurangi peranan bandar pupuk teh dan pendirian pengolah teh yang besar mengurangi ruang gerak pabrik tradisional	X	X			

Bogor, 10 Agustus 1969

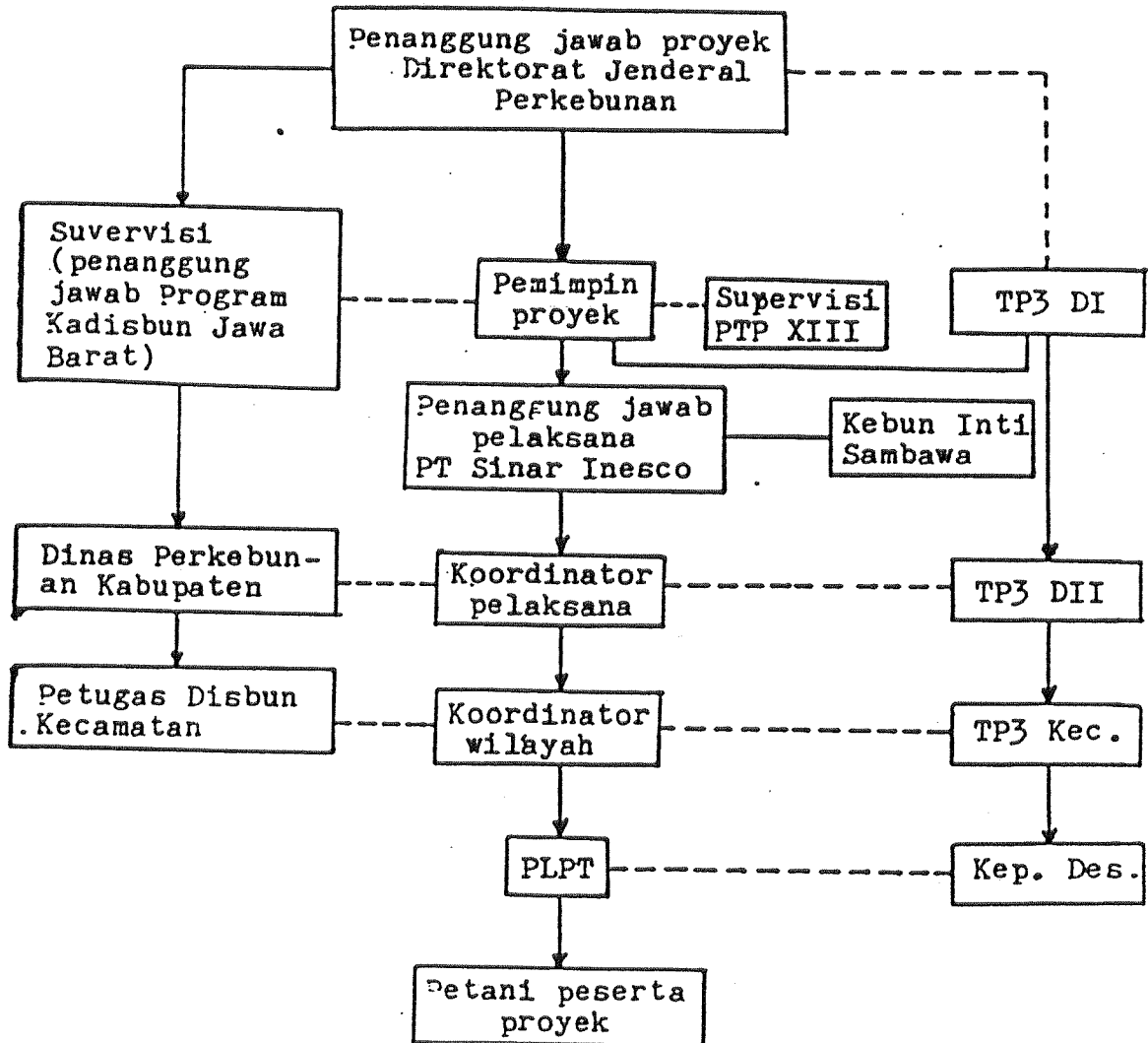
A. Soeharjo dan Tim

Lampiran 1. Pendapatan Rumah tangga Petani Teh di Desa Penelitian, 1988

Desa dan golongan petani	Sumber pendapatan (%)			Pendapatan Rumah tangga (Rp/tahun)
	Teh	Tanaman lain	Luar pertanian	
A. Tehnusamba				
Bojong (Skb)				
Petani luas	24,7	57,7	17,6	3 530 950
Petani kecil	15,7	50,3	34,0	1 104 623
Pasirsalam (Tsk)				
Petani luas	11,1	42,0	46,9	1 930 162
Petani kecil	5,2	42,1	52,7	752 952
B. PIR-lokal				
Bojongsambir (Tsk)				
Petani luas	52,8	13,5	33,7	2 669 762
Petani kecil	27,4	20,2	52,4	988 935
Ciroyom (Tsk)				
Petani luas	63,7	26,9	9,3	1 430 050
Petani kecil	8,1	70,7	21,2	1 108 428
C. Bukan peserta PIR				
Bojongsambir (Tsk)				
Petani luas	28,2	43,9	27,9	2 725 791
Petani kecil	16,4	18,6	65,0	1 183 268
Ciroyom (Tsk)				
Petani luas	-	-	-	-
Petani kecil	9,4	53,3	37,3	701 940

Skb = Sukabumi
Tsk = Tasikmalaya

Lampiran 2. Struktur Organisasi Proyek PIR-BUN, khususnya PIR Lokal



Keterangan :

----- : Garis Koordinasi

TP3 D I : Team Pembina Proyek-proyek Perkebunan Daerah Tingkat I

TP3 D II : Team Pembina Proyek-proyek Perkebunan Daerah Tingkat II

TP3 Kec. : Team Pembina Proyek-proyek Perkebunan Kecamatan

Lampiran 3. Struktur Pembinaan Petani Teh Rakyat
Binaan P.T Tehnusamba Indah

